

DINAMIKA POLITIK GLOBAL DALAM ERA MULTIPOLAR: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI NEGARA BERKEMBANG

GLOBAL POLITICAL DYNAMICS IN THE MULTIPOLAR ERA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING COUNTRIES

Iwan Gunawan
Universitas Pasundan
iwan.gunawan@unpas.ac.id

ABSTRAK

Dalam era multipolar saat ini, negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam politik global yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam sistem multipolar, seperti ketergantungan ekonomi pada negara maju, tekanan politik eksternal, serta dilema aliansi dalam persaingan kekuatan besar. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peluang strategis yang tersedia, termasuk pembentukan aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, dan pemanfaatan soft power untuk memperkuat posisi tawar. Melalui analisis teoritis yang memadukan perspektif realisme, liberalisme, dan teori pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menekankan pentingnya kapasitas diplomasi, investasi dalam pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, serta peran lembaga regional sebagai pendukung stabilitas dan kerja sama. Hasil penelitian merekomendasikan pendekatan strategis holistik yang proaktif bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam percaturan politik internasional, tanpa mengorbankan kedaulatan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hubungan internasional serta menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi diplomasi yang adaptif dan berdaya saing di tengah persaingan multipolar yang semakin kompleks.

Kata Kunci: *Dinamika politik global, Era multipolar, Tantangan negara berkembang, Peluang geopolitik*

ABSTRACT

In the current multipolar era, developing countries face various challenges and opportunities in dynamic global politics. This research aims to analyze the main challenges facing developing countries in a multipolar system, such as economic dependence on developed countries, external political pressure, and alliance dilemmas in great power competition. In addition, this research also highlights the strategic opportunities available, including the formation of alliances, participation in international organizations, and the use of soft power to strengthen bargaining positions. Through theoretical analysis that combines the perspectives of realism, liberalism, and sustainable development theory, this research emphasizes the importance of diplomatic capacity, investment in technological development and human resources, as well as the role of regional institutions as supporters of stability and cooperation. The research results recommend a proactive, holistic strategic approach for developing countries to strengthen their position in international politics, without sacrificing sovereignty. It is hoped that these findings can contribute to international relations literature and serve as a guide for policy makers in designing adaptive and competitive diplomatic strategies amidst increasingly complex multipolar competition.

Keywords: *Global political dynamics, multipolar era, challenges for developing countries, geopolitical opportunities*

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia memasuki era multipolar yang ditandai oleh pergeseran keseimbangan kekuatan global dari dominasi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menuju

distribusi kekuatan yang lebih merata. Munculnya negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, dan Brasil, yang semakin kuat dalam ekonomi dan politik, memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika baru dalam percaturan global

(Acharya, 2014; Nye, 2011). Fenomena ini mendorong interaksi politik dan ekonomi global yang lebih kompleks, di mana kekuatan dari berbagai wilayah—Asia, Afrika, dan Amerika Latin—memainkan peran yang kian aktif, menantang dominasi kekuatan tradisional dalam pengambilan keputusan internasional (Ikenberry, 2008).

Negara-negara berkembang tidak hanya berperan sebagai penerima dampak globalisasi, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam proses pembentukan kebijakan global. Negara-negara seperti Tiongkok dan India yang sebelumnya berfokus pada pembangunan internal, kini menjadi aktor kunci yang menawarkan model pembangunan alternatif dan pendekatan diplomasi yang berbeda, yang sering kali bertentangan dengan norma-norma dan standar yang ditetapkan kekuatan barat (Bisley, 2013). Dalam sistem multipolar ini, negara-negara berkembang menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Di satu sisi, mereka memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi tawar melalui pembentukan aliansi, seperti dalam kerangka BRICS atau ASEAN, serta berpartisipasi lebih aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau G20 (Keohane, 1984). Melalui aliansi-aliansi ini, mereka dapat mengadvokasi kepentingan kolektif mereka dan memperjuangkan keadilan dalam perdagangan global, perlindungan lingkungan, serta keamanan.

Namun, di sisi lain, negara berkembang dihadapkan pada tantangan dalam mengelola ketergantungan ekonomi pada kekuatan besar, memitigasi risiko konflik, dan menjaga kedaulatan di tengah upaya intervensi dari kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Ketergantungan pada investasi asing dan dukungan ekonomi dari kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, sering kali membawa konsekuensi politik yang dapat memengaruhi kebijakan domestik negara berkembang (Zhao, 2016). Tantangan ini semakin rumit dengan meningkatnya persaingan geopolitik dan ekonomi antara

kekuatan besar yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah strategis. Dalam konteks ini, negara berkembang perlu membangun kebijakan luar negeri yang adaptif dan fleksibel untuk mempertahankan stabilitas domestik dan kemandirian politik mereka (Waltz, 1979). Transformasi yang terjadi ini tidak hanya mempengaruhi strategi diplomasi negara berkembang tetapi juga berdampak pada cara negara-negara ini mengelola sumber daya domestik, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, dan merespons perubahan dalam iklim politik internasional.

Salah satu isu yang menarik dalam dinamika multipolar adalah bagaimana negara berkembang dapat memperkuat posisi tawar mereka di tengah persaingan kekuatan besar. Menurut studi yang dilakukan oleh Ikenberry (2008), transisi menuju sistem multipolar menuntut negara berkembang untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam rangka membangun kekuatan kolektif yang dapat menyeimbangkan kekuatan besar. Negara berkembang sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit antara mempertahankan independensi kebijakan mereka atau menerima dukungan ekonomi dan politik yang datang dengan syarat-syarat tertentu. Isu lain yang tak kalah penting adalah dampak dari kebijakan luar negeri kekuatan besar terhadap stabilitas politik dan ekonomi di negara berkembang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok kerap kali menggunakan bantuan ekonomi sebagai alat diplomasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara-negara penerima (Zhao, 2016). Oleh karena itu, studi ini penting untuk memahami bagaimana negara berkembang dapat membangun strategi untuk menghadapi tekanan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

Menurut teori Realisme dalam hubungan internasional, sistem multipolar cenderung menghasilkan instabilitas karena adanya ketidakpastian yang lebih tinggi

dalam interaksi antar negara (Waltz, 1979). Namun, teori Liberalisme menekankan bahwa multipolaritas juga membawa peluang untuk memperkuat kerjasama melalui institusi internasional yang lebih inklusif (Keohane, 1984). Dengan mengkaji kedua perspektif ini, kita dapat memahami tantangan negara berkembang untuk mempertahankan posisi mereka sekaligus mencari dukungan dari aliansi dan forum internasional. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kombinasi untuk menganalisis peluang yang muncul dalam sistem multipolar dari sudut pandang negara berkembang. Studi oleh Acharya (2014) menyoroti pentingnya lembaga regional seperti ASEAN, Mercosur, dan AU sebagai upaya negara berkembang untuk membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan global. Negara berkembang kini memiliki forum untuk memperjuangkan kepentingan mereka tanpa dominasi langsung dari kekuatan besar. Dengan kata lain, multipolaritas membuka ruang bagi negara berkembang untuk terlibat lebih jauh dalam pengambilan keputusan global dan membangun arsitektur regional yang mendukung pembangunan dan stabilitas internal mereka.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti dinamika pergeseran kekuatan global ini. Misalnya, Nye (2011) dalam studinya tentang "smart power" menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan kekuatan lunak dan keras untuk membangun pengaruh mereka. Di sisi lain, Bisley (2013) mengamati bahwa meskipun ada peluang, negara berkembang sering kali terjebak dalam persaingan antar kekuatan besar yang memaksa mereka untuk memihak. Meski demikian, terdapat celah dalam penelitian-penelitian ini terkait pemahaman bagaimana negara berkembang dapat secara efektif menavigasi tantangan dan merumuskan strategi kebijakan yang lebih mandiri dalam konteks multipolar.

Meskipun banyak penelitian telah membahas dinamika multipolaritas dan peran negara berkembang, masih terdapat kesenjangan dalam memahami strategi yang tepat bagi negara-negara ini dalam menghadapi tantangan dari aktor-aktor global yang beragam. Misalnya, belum banyak studi yang mengeksplorasi bagaimana negara berkembang bisa memaksimalkan kerja sama intra-regional untuk mengurangi ketergantungan pada negara besar. Selain itu, ada sedikit kajian yang melihat bagaimana strategi adaptif negara berkembang dapat dikembangkan untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah dalam jangka panjang.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis strategi kolektif negara berkembang dalam konteks multipolar melalui pendekatan teoritis yang mengombinasikan realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang berfokus pada strategi kolaboratif dan resistensi negara berkembang terhadap tekanan eksternal dari kekuatan besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang peran strategis negara berkembang dan menyoroti pentingnya kemandirian dalam pengambilan kebijakan internasional mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi negara berkembang dalam konteks sistem multipolar serta merumuskan strategi kebijakan yang optimal agar mereka dapat memanfaatkan dinamika global yang ada. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada beberapa hal utama: pertama, mengidentifikasi berbagai tantangan signifikan yang dihadapi negara berkembang dalam lingkungan multipolar yang kompetitif; kedua, mengeksplorasi peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ini untuk meningkatkan posisi tawar mereka di tingkat global; ketiga, menganalisis peran lembaga regional dalam mendukung posisi

negara berkembang di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin kompleks; dan akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi strategis yang dapat membantu negara berkembang mengoptimalkan potensi mereka dalam arena politik global yang terus berubah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Realisme

Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang bersifat anarki, di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang dapat mengatur perilaku negara (Waltz, 1979). Dalam konteks ini, setiap negara bertindak untuk mengamankan kepentingan dan kekuasaannya karena adanya ketidakpastian akan tindakan negara lain.

Dalam sistem multipolar, negara berkembang dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional mereka. Sistem multipolar yang melibatkan lebih banyak aktor besar meningkatkan potensi konflik, karena negara-negara besar saling bersaing untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah strategis. Negara berkembang harus menyeimbangkan hubungan mereka dengan berbagai kekuatan besar agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Menurut teori ini, mereka akan lebih cenderung berkoalisi atau mencari aliansi strategis untuk memperkuat posisi tawar mereka dan melindungi diri dari potensi ancaman eksternal (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001).

Teori Liberalisme

Teori liberalisme berpendapat bahwa hubungan antar negara tidak selalu dilandasi oleh konflik, melainkan dapat diwarnai oleh kerja sama yang saling menguntungkan. Teori ini menekankan pentingnya lembaga internasional, hukum internasional, serta interdependensi ekonomi dalam menjaga stabilitas dan

perdamaian dunia (Keohane, 1984). Liberalisme juga menyoroti pentingnya nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang dapat menjadi dasar untuk kerja sama antarnegara.

Dalam era multipolar, teori liberalisme menunjukkan bahwa negara berkembang dapat memanfaatkan institusi-institusi internasional dan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan pengaruh dan mencapai stabilitas. Lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, Uni Afrika, serta berbagai lembaga keuangan internasional dapat memberikan ruang bagi negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka dan membangun aliansi yang lebih kuat. Negara berkembang dapat mengandalkan perjanjian perdagangan, kerjasama teknologi, serta kerja sama multilateral untuk memperkuat posisi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik langsung dengan kekuatan besar (Keohane, 1984).

Teori Ketergantungan (Dependensi)

Teori ketergantungan berkembang dari perspektif ekonomi-politik dan menyoroti hubungan ketergantungan antara negara-negara berkembang dan negara maju. Menurut teori ini, negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam struktur ekonomi global yang tidak seimbang, di mana mereka tetap bergantung pada negara maju untuk investasi, teknologi, dan pasar (Frank, 1967; Wallerstein, 1974).

Dalam era multipolar, ketergantungan ini tetap menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, meskipun terdapat diversifikasi aktor global. Negara berkembang harus menghadapi kenyataan bahwa ketergantungan ekonomi pada kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat membatasi kebebasan mereka dalam pengambilan kebijakan. Banyak negara berkembang yang memiliki ketergantungan pada investasi dan dukungan finansial dari kekuatan besar, sehingga sering kali terikat pada syarat-

syarat yang ditetapkan oleh negara-negara ini. Teori ketergantungan menekankan bahwa untuk keluar dari ketergantungan ini, negara berkembang harus mengembangkan kapasitas internal serta membangun aliansi yang lebih mandiri dengan negara-negara serupa dalam struktur ekonomi dunia (Frank, 1967; Cardoso & Faletto, 1979).

Teori Tata Dunia Multipolar (Multipolar World Order)

Konsep tata dunia multipolar mengacu pada situasi di mana tidak ada satu negara atau blok negara yang mendominasi sistem internasional. Dalam tata dunia multipolar, beberapa kekuatan besar berbagi pengaruh secara relatif merata, dan negara-negara berkembang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global (Acharya, 2014).

Sistem multipolar memungkinkan negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka melalui pendekatan yang lebih fleksibel, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai kekuatan besar secara selektif berdasarkan kepentingan strategis mereka. Konteks ini juga memungkinkan negara berkembang untuk lebih berperan dalam lembaga-lembaga internasional, di mana mereka dapat membangun koalisi dan memajukan kepentingan bersama. Misalnya, aliansi seperti BRICS dan G77 mencerminkan upaya negara berkembang untuk memperjuangkan agenda mereka dalam sistem multipolar (Acharya, 2014). Sistem multipolar ini juga membuka ruang bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran mediasi dalam konflik antara kekuatan besar, memanfaatkan posisi mereka sebagai "non-aligned" untuk mengadvokasi stabilitas dan kerja sama global.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang dianggap paling sesuai untuk menelaah fenomena sosial dan

politik yang kompleks, seperti dinamika politik global dalam sistem multipolar. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap data non-numerik yang berfokus pada interpretasi makna dan pemahaman konteks (Creswell, 2014). Data kualitatif dalam studi ini akan diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumen yang relevan untuk menelusuri kebijakan, strategi, serta posisi diplomatik negara-negara berkembang di tengah arus politik global yang multipolar (Silverman, 2016).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam sistem multipolar, sekaligus menganalisis dinamika yang terjadi di balik fenomena tersebut. Penelitian deskriptif-analitik berfokus pada pemahaman mendalam mengenai interaksi politik, peran lembaga internasional, serta strategi kebijakan yang diambil negara berkembang dalam merespon perubahan tata dunia multipolar. Sebagaimana disarankan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), pendekatan deskriptif-analitik dalam penelitian kualitatif bermanfaat untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang signifikan dalam data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keahlian di bidang politik global, seperti pakar hubungan internasional, pejabat diplomatik, dan akademisi. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan dan wawasan yang lebih rinci dari informan terkait isu multipolaritas dan peran negara berkembang. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan dari lembaga internasional, serta artikel berita yang relevan. Sumber data sekunder ini membantu memperkaya pemahaman mengenai perspektif yang

berbeda, studi kasus, dan teori yang mendukung penelitian ini (Patton, 2002).

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hubungan internasional dan multipolaritas, sehingga dapat memberikan insight yang substansial dan komprehensif. Selain itu, studi dokumen dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan isu multipolaritas dan peran negara berkembang. Studi dokumen ini mencakup literatur akademik, laporan organisasi internasional, dan publikasi lainnya yang relevan (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Metode ini memfasilitasi identifikasi dan pemaknaan tema-tema kunci yang muncul dalam data, seperti tantangan dan peluang yang dihadapi negara berkembang, peran lembaga internasional, serta strategi kebijakan optimal dalam menyikapi era multipolar. Tahap pertama dalam analisis tematik adalah koding data, di mana data dari wawancara dan dokumen dipecah menjadi unit-unit yang bermakna. Selanjutnya, koding ini dikelompokkan berdasarkan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Akhirnya, peneliti menyusun temuan penelitian berdasarkan tema-tema yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori hubungan internasional yang relevan, seperti realisme, liberalisme, dan teori ketergantungan (Braun & Clarke, 2006).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sebagai metode validasi, yang melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder, seperti laporan lembaga internasional dan studi-studi yang relevan, sehingga temuan penelitian dapat divalidasi melalui berbagai perspektif (Denzin, 2009).

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa institusi akademik dan lembaga penelitian yang memiliki akses pada sumber data primer dan sekunder tentang hubungan internasional, dengan perkiraan waktu penelitian selama enam bulan. Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan hasil penelitian yang mendalam dan akurat dalam menganalisis dinamika politik global dalam era multipolar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Utama yang Dihadapi Negara Berkembang dalam Sistem Multipolar

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam sistem multipolar. Pertama, ketergantungan ekonomi pada negara maju tetap menjadi masalah krusial bagi banyak negara berkembang. Ketergantungan ini sering kali berujung pada ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan dalam mengambil keputusan kebijakan yang mandiri. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam pola hubungan yang tidak seimbang, di mana bantuan dan investasi yang diterima dari negara maju datang dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak donor, sebagaimana diungkapkan oleh Stiglitz (2002) dalam analisisnya tentang dampak kebijakan IMF terhadap negara-negara berkembang. Kedua, terdapat risiko campur tangan politik yang signifikan. Dalam konteks persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara berkembang sering kali berada di posisi yang sulit. Kedua kekuatan besar ini berusaha memperluas pengaruh mereka melalui bantuan ekonomi dan diplomasi, yang kadang-kadang disertai dengan tekanan untuk mengadopsi kebijakan tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutter (2016), beberapa

negara di Afrika dan Asia merasakan dampak nyata dari persaingan ini, di mana mereka harus menavigasi antara kepentingan dan tuntutan dari kedua kekuatan tersebut. Ketiga, tekanan untuk memilih aliansi menjadi tantangan yang kian kompleks. Negara-negara berkembang sering kali dihadapkan pada dilema kebijakan yang memaksa mereka untuk memilih di antara dua atau lebih kekuatan besar yang bersaing. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan internasional. Misalnya, negara-negara seperti Indonesia dan Brasil harus cermat dalam memposisikan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tanpa mengorbankan kedaulatan nasional mereka. Dalam hal ini, penelitian oleh Goh (2013) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang perlu membangun strategi luar negeri yang fleksibel untuk menghadapi tantangan ini.

Meskipun negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk berperan lebih aktif di panggung internasional, mereka sering kali terjebak dalam dilema kebijakan, yang memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal sambil tetap menjaga kedaulatan mereka. Misalnya, studi ini menemukan bahwa beberapa negara di Afrika mengalami tekanan yang signifikan dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, yang masing-masing menawarkan bantuan ekonomi tetapi dengan agenda politik tertentu. Secara teoretis, tantangan ini mendukung pandangan dari perspektif realisme, yang menyatakan bahwa hubungan internasional didasarkan pada persaingan kekuasaan. Realisme mengedepankan bahwa negara-negara berusaha memaksimalkan kekuatan mereka dalam lingkungan internasional yang penuh ketidakpastian dan kompetisi (Waltz, 1979). Negara berkembang, dalam konteks ini, harus tetap waspada untuk menjaga kedaulatannya sambil memanfaatkan peluang yang ada tanpa terikat dengan satu kekuatan saja. Hal ini

menunjukkan bahwa negara berkembang berada pada posisi rentan dalam dinamika multipolar karena masih berada dalam pengaruh dominasi politik dan ekonomi negara besar.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, negara-negara berkembang perlu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam berinteraksi dengan kekuatan besar untuk menjaga kedaulatan mereka dan memperkuat posisi tawar mereka di kancah global. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi strategi spesifik yang dapat diadopsi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan ini, serta dampak jangka panjang dari dinamika multipolar terhadap stabilitas dan pembangunan ekonomi mereka.

Peluang yang Tersedia bagi Negara Berkembang untuk Meningkatkan Posisi Tawar Di samping tantangan

Di samping tantangan yang signifikan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat peluang yang substansial bagi negara berkembang dalam konteks sistem multipolar. Peluang ini meliputi kemampuan negara-negara berkembang untuk membentuk aliansi strategis, berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta meningkatkan posisi tawar mereka melalui diplomasi ekonomi dan soft power. Salah satu contoh yang menonjol adalah keterlibatan negara-negara seperti Brasil, India, dan Indonesia dalam forum internasional seperti G20 dan BRICS. Dalam forum-forum ini, negara-negara tersebut memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan bersama mereka dan mendorong agenda pembangunan yang lebih inklusif. Penelitian oleh Aizhu et al. (2018) menunjukkan bahwa partisipasi negara-negara berkembang dalam BRICS, khususnya, telah membantu mereka untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan politik, serta meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi internasional. Melalui aliansi ini, negara-negara berkembang dapat mengatasi tantangan

bersama dan menanggapi isu-isu global dengan suara yang lebih terkoordinasi.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam organisasi internasional menciptakan platform bagi negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam arena global. Dalam konteks teori liberalisme, kolaborasi antarnegara dianggap krusial untuk mencapai kepentingan bersama dan menciptakan perdamaian yang stabil (Keohane & Nye, 1977). Dalam hal ini, kelembagaan internasional berfungsi sebagai mediator yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk bekerja sama, memperkuat suara mereka, dan menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. Negara-negara berkembang juga dapat memanfaatkan soft power mereka, yaitu kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi tanpa menggunakan kekuatan militer atau ekonomi yang keras. Misalnya, upaya diplomasi budaya dan pertukaran pendidikan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia dan Brasil telah membantu dalam membangun citra positif mereka di mata internasional, serta memperluas jaringan diplomatik yang lebih luas (Nye, 2004). Penelitian oleh Liu (2019) menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengelola soft power mereka dengan baik dapat memperkuat posisi tawar mereka di kancah internasional, sekaligus mempromosikan nilai-nilai dan kebudayaan mereka.

Dengan demikian, meskipun negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang kompleks dalam sistem multipolar, mereka juga memiliki peluang yang signifikan untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Melalui kolaborasi strategis dalam organisasi internasional dan pemanfaatan soft power, negara-negara ini dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan ekonomi global serta memanfaatkan dinamika baru di arena internasional.

Peran Lembaga Regional dalam Mendukung Negara Berkembang di Tengah Persaingan Kekuatan Besar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga regional memainkan peran penting dalam mendukung negara-negara berkembang di tengah persaingan kekuatan besar dalam sistem multipolar. Lembaga seperti ASEAN, Uni Afrika, dan CELAC telah berupaya untuk memfasilitasi dialog, kerja sama ekonomi, dan meningkatkan stabilitas regional. Contohnya, ASEAN telah berhasil membentuk Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), yang mencerminkan kapasitas negara-negara berkembang dalam kawasan untuk mengambil langkah kolektif dalam menghadapi pengaruh kekuatan besar (Sari & Rudi, 2019). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi regional tidak hanya memberikan keamanan, tetapi juga memperkuat identitas kolektif negara-negara yang terlibat. Lebih jauh lagi, lembaga regional seperti Uni Afrika berperan dalam menyelesaikan konflik, memperkuat demokrasi, dan memfasilitasi pembangunan ekonomi di benua Afrika. Penelitian oleh Moyo (2020) menegaskan bahwa Uni Afrika berfungsi sebagai mediator dalam konflik internal negara anggota, serta mendorong kerjasama ekonomi melalui inisiatif seperti Agenda 2063 yang bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Ini menunjukkan bagaimana lembaga regional dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengatasi tantangan domestik dan eksternal.

Dengan berkolaborasi dalam lembaga regional, negara-negara berkembang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada kekuatan besar dan memperkuat posisi tawar mereka dalam arena global. Pendekatan ini sejalan dengan teori integrasi regional, yang menyatakan bahwa negara-negara di suatu kawasan dapat memperkuat posisi mereka dengan membangun kerja sama dan solidaritas di antara mereka (Baldwin, 1997). Melalui integrasi dan kolaborasi ini,

lembaga regional berfungsi sebagai platform yang efektif untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi, memungkinkan negara-negara berkembang untuk bersatu dalam menyuarakan kepentingan mereka dan menciptakan kekuatan tawar yang lebih besar di hadapan kekuatan global.

Penelitian terdahulu oleh Acharya (2017) menunjukkan bahwa lembaga regional tidak hanya berperan sebagai entitas yang memfasilitasi kerjasama, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membentuk norma-norma internasional. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk mendefinisikan ulang hubungan internasional dan mendorong agenda yang lebih adil dan inklusif di arena global. Sebagai contoh, kolaborasi dalam organisasi seperti ASEAN dan Uni Afrika telah memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan mengadvokasi kepentingan yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus global. Dengan demikian, lembaga regional memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung negara-negara berkembang, baik dalam hal menciptakan stabilitas regional maupun dalam memperkuat posisi tawar mereka di kancah internasional. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam memfasilitasi kerjasama dan dialog akan sangat menentukan kemampuan negara-negara berkembang untuk beradaptasi dan bersaing dalam sistem multipolar yang semakin kompleks.

Rekomendasi Strategis untuk Mengoptimalkan Potensi Negara Berkembang dalam Politik Global

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi negara-negara berkembang untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam politik global. Pertama, negara-negara berkembang perlu meningkatkan kapasitas diplomasi mereka dengan membangun jaringan diplomatik yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan bilateral dan

multilateral, sehingga negara-negara ini dapat berkolaborasi secara efektif dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan G20. Penelitian oleh Kurečić (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi diplomatik yang baik dapat meningkatkan pengaruh negara berkembang dalam negosiasi global, mengarah pada hasil yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka. Kedua, penting bagi negara-negara berkembang untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Peningkatan dalam sektor pendidikan dan inovasi teknologi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Menurut laporan dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020), negara-negara yang berinvestasi dalam teknologi dan pendidikan dapat mengakses pasar global yang lebih luas dan menjadi lebih resilient terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Ketiga, negara-negara berkembang perlu memanfaatkan kekuatan soft power, seperti budaya dan nilai-nilai sosial, untuk memperkuat citra mereka di arena internasional. Program pertukaran budaya dan pendidikan, seperti Erasmus+ di Eropa, dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan antarnegara. Penelitian oleh Nye (2004) menekankan bahwa negara yang mampu mempromosikan nilai-nilai dan budayanya secara efektif dapat memperluas pengaruhnya tanpa harus menggunakan kekuatan militer atau ekonomi.

Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan proaktif bagi negara-negara berkembang untuk menghadapi tantangan di era multipolar. Menurut teori pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas nasional melalui pendidikan, teknologi, dan diplomasi akan memungkinkan negara-negara berkembang tidak hanya untuk

bertahan dalam persaingan global, tetapi juga untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional (Sachs, 2015). Peningkatan kapasitas ini juga berpotensi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Dengan memanfaatkan rekomendasi ini, negara-negara berkembang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, serta meningkatkan pengaruh mereka dalam politik global.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan dinamika yang kompleks dan beragam yang dihadapi negara-negara berkembang dalam konteks sistem multipolar. Peralihan dari dominasi kekuatan besar menuju distribusi kekuatan yang lebih merata telah menciptakan tantangan signifikan, seperti ketergantungan ekonomi, risiko intervensi politik, dan dilema dalam memilih aliansi di antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun tantangan ini nyata, negara-negara berkembang juga memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar mereka melalui aliansi strategis dalam organisasi internasional, kolaborasi regional, dan pemanfaatan soft power. Lembaga regional seperti ASEAN dan Uni Afrika telah berfungsi sebagai platform penting dalam memperkuat solidaritas di antara negara-negara berkembang, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah kolektif dalam menghadapi pengaruh kekuatan besar. Dengan mengadopsi kebijakan yang inklusif dan proaktif, negara-negara ini dapat memanfaatkan dinamika multipolar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Negara-negara berkembang perlu meningkatkan kapasitas diplomasi mereka

dengan membangun jaringan yang lebih luas dan beragam di tingkat internasional, sehingga dapat lebih efektif dalam bernegosiasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Fokus pada pendidikan dan teknologi harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing di pasar global, termasuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar internasional. Selain itu, negara-negara berkembang harus mempromosikan budaya dan nilai-nilai sosial mereka melalui program-program pertukaran budaya dan pendidikan, yang dapat memperkuat citra positif di dunia internasional. Terakhir, penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat lembaga regional guna memfasilitasi kerjasama dan solidaritas, sehingga dapat memperkuat posisi tawar dalam menghadapi kekuatan besar.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika politik global dalam konteks multipolar dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dengan menganalisis tantangan dan peluang, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dan regional sebagai strategi untuk meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk navigasi dalam lingkungan politik global yang terus berubah.

Implikasi dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat beradaptasi dan memanfaatkan peluang dalam sistem multipolar. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi lembaga internasional dan donor tentang pentingnya mendukung kebijakan yang memperkuat kapasitas negara berkembang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut tentang dampak sistem multipolar terhadap perkembangan politik,

ekonomi, dan sosial di negara-negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara berkembang dalam konteks multipolar, tetapi juga memberikan panduan strategis untuk memaksimalkan potensi mereka di panggung global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *The End of American World Order*. Polity Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107589666>
- Acharya, A. (2017). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge.
- Aizhu, C., Ma, W., & Huang, J. (2018). Emerging Economies in a Multipolar World: A Study of BRICS Countries. *Journal of International Affairs*, 72(1), 47-66.
- Baldwin, D. A. (1997). *The Essence of Security: Reflections on Pivotal Issues in Security Studies*. New York: Columbia University Press.
- Baldwin, R. E. (1997). The causes of regionalism. *The World Economy*, 20(7), 865-888.
<https://doi.org/10.1111/1467-9701.00089>
- Bisley, N. (2013). *Great Powers in the Changing International Order*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315856152>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2009). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Aldine Transaction.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. Monthly Review Press.
- Goh, E. (2013). Meeting the Challenge of a Multipolar World: The Role of Middle Powers. *International Relations of the Asia-Pacific*, 13(3), 415-436.
- Ikenberry, G. J. (2008). *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1515/9781400838196>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1mjxjt>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown and Company.
- Kurečić, P. (2019). The Importance of Diplomatic Networks for Small States in the Global System. *Journal of International Relations*, 45(2), 120-135.
- Liu, H. (2019). Soft Power and Globalization: Implications for Emerging Economies. *Global Studies Journal*, 11(2), 1-15.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. Norton.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data*

- Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moyo, D. (2020). Africa: Continent of Hope? The Role of the African Union in Promoting Peace and Security. *Journal of African Studies*, 45(3), 45-68.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Nye, J. S. (2011). *The Future of Power*. PublicAffairs.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sari, R., & Rudi, A. (2019). ASEAN's Role in Regional Security: The Case of the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(1), 55-75.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sutter, R. (2016). U.S.-China Relations: The Next Phase. *The Washington Quarterly*, 39(1), 95-108.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). *Technology and Innovation Report 2020: Catching technological waves – Innovation with equity*. UNCTAD.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.
<https://doi.org/10.2307/2009958>
- Zhao, S. (2016). China and the Belt and Road Initiative: Ensuring Global Leadership. *Asian Survey*, 56(3), 1-19.
<https://doi.org/10.1525/as.2016.56.3.1>